

SINERGITAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG DAN PT ADARO INDONESIA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM CSR

Kadarisman¹, Budi Suryadi², Asmu'i³

PT Adaro, Tabalong¹; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat^{2,3}
kadarisman@adaro.com, budisuryadi@ulm.ac.id

Abstract

The background of the problem regarding the synergy between the Regional Government and PT Adaro Indonesia in implementing CSR programs in Tabalong Regency in the economic field is the lack of realization of CSR programs from PT Adaro Indonesia. From the social aspect, it is the expansion of the mining area which triggers conflicts between the community and the company. Meanwhile, from the environmental aspect, there are a number of public complaints due to environmental pollution and/or destruction. The purpose of this study was to determine the synergy between the Regional Government and PT Adaro Indonesia in the implementation of the CSR program and to determine the factors that influence the synergy between the Regional Government and PT Adaro Indonesia in implementing the CSR program in Tabalong Regency. This study uses a descriptive qualitative data presentation method with data collection techniques through observation and purposive interviews with informants. In this study, the author uses qualitative data analysis techniques with the aim of providing a complete, actual, and accurate picture of the phenomenon under study. The results of the study indicate that the synergy between the Regional Government and PT Adaro Indonesia in implementing CSR programs in Tabalong Regency is carried out through coordination and communication activities. The implementation of coordination between the local government and PT Adaro Indonesia in implementing CSR programs includes development programs in the economic, social and environmental fields. The coordination process is carried out through meetings to conduct program discussions based on the results of data collection and a list of existing proposals. As for the results of the coordination, several programs have been established, including the development of MSMEs, they are trained to make packaging, branding, capital and internet access. In the environmental field, there are Adiwiyata schools, waste banks and climate villages. Meanwhile, communication activities are carried out through joint meeting forums to discuss several CSR programs in Tabalong Regency, both economic, social and environmental development programs. To increase the synergy between the Regional Government and PT Adaro Indonesia in implementing CSR programs in Tabalong Regency, it is suggested to the Tabalong Regency Regional Government to issue a special policy as a guideline and technical guide that requires companies to consult CSR program plans in Tabalong Regency.

Keywords: Synergy, Implementation of CSR Program Implementation.

Abstrak

Latar belakang permasalahan tentang sinergitas Pemerintah Daerah dan PT Adaro Indonesia dalam pelaksanaan program CSR di Kabupaten Tabalong dalam bidang ekonomi adalah kurangnya realisasi program dari CSR PT Adaro Indonesia. Dari aspek sosial adalah perluasan areal tambangnya yang memicu terjadinya konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan. Sedangkan dari aspek lingkungan sejumlah pengaduan masyarakat akibat pencemaran dan/atau

perusakan lingkungan hidup. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sinergitas Pemerintah Daerah dan PT Adaro Indonesia dalam pelaksanaan program CSR serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sinergitas Pemerintah Daerah dan PT Adaro Indonesia dalam pelaksanaan program CSR di Kabupaten Tabalong. Penelitian ini menggunakan metode penyajian data secara deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan narasumber secara purposive. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa data kualitatif dengan tujuan memberikan gambaran secara lengkap aktual, dan akurat mengenai fenomena yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas Pemerintah Daerah dan PT Adaro Indonesia dalam pelaksanaan program CSR di Kabupaten Tabalong dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi dan komunikasi. Pelaksanaan koordinasi pemerintah daerah dan PT Adaro Indonesia dalam pelaksanaan program CSR meliputi program pembangunan dalam bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Proses koordinasi dilakukan melalui pertemuan untuk melakukan pembahasan program berdasarkan hasil pendataan dan daftar usulan yang ada. Adapun hasil-hasil koordinasi tersebut telah menetapkan beberapa program diantaranya adalah pembinaan UMKM mereka dilatih bikin packaging, branding, permodalan dan akses internet. Dalam bidang lingkungan adalah sekolah adiwiyata, bank sampah dan kampung iklim. Sedangkan untuk kegiatan komunikasi dilakukan melalui forum pertemuan bersama guna membahas beberapa program program CSR di Kabupaten Tabalong baik program pembangunan bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Untuk meningkatkan sinergitas Pemerintah Daerah dan PT Adaro Indonesia dalam pelaksanaan program CSR di Kabupaten Tabalong disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong untuk menerbitkan suatu kebijakan khusus sebagai pedoman dan petunjuk teknis yang mewajibkan perusahaan untuk mengkonsultasikan rencana program program CSR di Kabupaten Tabalong.

Kata Kunci : Sinergitas, Pelaksanaan Pelaksanaan Program CSR

PENDAHULUAN

PT. Adaro Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari PT Adaro Energy Tbk, adalah sebuah perusahaan batubara terbesar yang memproduksi batu bara yang berasal dari tambang di Kabupaten Tabalong. Perusahaan tersebut menjadi tulang punggung bagi bisnis PT Adaro Energy Tbk. PT Adaro Indonesia menyadari bahwa kehadirannya membawa dampak yang signifikan terhadap wilayah dimana operasinya dijalankan. Pada konsesinya di Kalimantan Selatan, PT Adaro Indonesia yang beroperasi di wilayah yang meliputi area seluas 358km², dengan 36 desa terletak di dekat tambang Tutupan, dan 26 desa lagi yang terletak di sepanjang jalur angkutan darat ke Kelanis, telah membawa pengaruh perubahan yang cukup besar bagi masyarakat disekitarnya.

PT. Adaro Indonesia memahami pentingnya membawa energi positif ke kelompok-kelompok masyarakat ini dan membangun kapasitas mereka untuk menjadi mandiri secara berkelanjutan. Dengan terbangunnya kemandirian masyarakat, maka operasi perusahaan di wilayah tersebut dapat berjalan dengan baik.

Guna menjamin sinergitas yang baik antara Pemerintah Daerah dan PT Adaro Indonesia maka

pihak pemerintah Daerah Tabalong dapat melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak perusahaan guna menyelesaikan berbagai permasalahan baik dalam aspek ekonomi sosial dan lingkungan dalam upaya menunjang program CSR di Kabupaten Tabalong sebagaimana pendapat Sali Susiana, (2015) bahwa Program CSR tidak hanya berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas dari itu, program CSR mencakup tiga lingkup kebijakan yakni pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan, terutama relasi antara aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek ekonomi dalam kerangka program CSR yang dipraktikkan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong dengan PT Adaro Indonesia menjadi penting untuk menciptakan pelaksanaan program CSR di Kabupaten Tabalong, sehingga dapat berjalan dengan baik.

Tidak dapat dipungkiri kemunculan permasalahan yang terjadi dilapangan seperti dalam bidang ekonomi Pemerintah kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan seperti pengaduan masalah pertanahan, lingkungan dengan juga realisasi program dari CSR PT Adaro Indonesia itu sendiri. Dari aspek sosial sebagai juga memiliki potensi

konflik pertanahan yang terjadi di beberapa area operasional PT Adaro Indonesia ketika pihak perusahaan melakukan perluasan areal tambangnya sehingga memicu terjadinya konflik baik antar masyarakat, maupun antara masyarakat dengan pihak perusahaan.

Sedangkan dari aspek lingkungan sejumlah pengaduan masyarakat akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup oleh aktivitas PT. Adaro Indonesia tetap terjadi, seperti beberapa kali terjadi kasus kematian ikan dalam jumlah besar milik masyarakat, sehingga banyak dipertanyakan efektivitas pelaksanaan AMDAL nya oleh masyarakat dan LSM lingkungan.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut di atas maka penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai sinergitas pemerintah daerah dan PT Adaro Indonesia dalam pelaksanaan program CSR di Kabupaten Tabalong.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penyajian data secara deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan narasumber.

Penelitian ini akan dilaksanakan pada di Kabupaten Tabalong dengan objek penelitian adalah pemerintah daerah dan PT Adaro Indonesia. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan observasi. Dengan demikian, maka data primer penelitian adalah informan pada saat wawancara penelitian. Sedangkan, data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Data tersebut berupa buku, literature, jurnal, laporan-laporan, surat kabar, hasil penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Menurut Afrizal (2014:139) informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian dan suatu hal kepada peneliti atau pewawancara. Afrizal juga membagi informan kedalam dua kategori, yaitu informan pengamat dan informan pelaku. Informan pengamat merupakan informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti. Sedangkan informan pelaku adalah informan yang memberikan keterangan tentang diri, perbuatan, pikiran, interpretasi ataupun pengetahuannya kepada peneliti. Informan

penelitian merupakan subjek penelitian yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian.

Instrumen merupakan alat bantu yang sangat penting dan mendukung strategis kelancaran dalam kegiatan penelitian, karena data yang diperoleh melalui instrument (Sugiyono, 2010:15). Menurut Sugiyono (2010:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian.

Menurut Afrizal (2014:176) analisis data dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas yang dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung, dilakukan mulai dari mengumpulkan data sampai pada tahap penulisan laporan.

Menurut Zulfadrial (2012:89) "keabsahan data merupakan padanan dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) menurut versi penelitian kuantitatif dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kerreteria, dan paradigmanya sendiri".

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Koordinasi

Koordinasi adalah salah satu system fungsi dari manajemen yang memegang peranan-peranan yang sama pentingnya dan juga beserta dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Pada dasarnya, setiap pihak yang terlibat dalam Koordinasi haruslah memiliki kesamaan persepsi mengenai tujuan yang akan di capai. Dengan demikian walaupun memiliki tugas dan fungsi serta tanggung jawab yang berbeda, baik Pemerintah Daerah maupun PT Adaro Indonesia. Namun Koordinasi yang dilakukan oleh keduanya adalah dalam rangka saling melengkapi atau membantu agar tercapainya tujuan bersama. Oleh karna itu, pola koordinasi yang efektif memiliki indikator-indikator penting untuk menjadi acuan tercapainya tujuan bersama tersebut. Adapun beberapa hal yang menjadi tolak ukur koordinasi yang dilakukan kedua pihak adalah terkait dengan pelaksanaan program CSR di Kabupaten Tabalong yang ditinjau dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Koordinasi sangat di perlukan juga dalam manajemen, untuk menggabungkan persamaan pandangan diantara berbagai pihak-pihak yang

berkepentingan duntuk mencapai tujuan bersama. Koordinasi dibutuhkan untuk menyambungkan bagian-bagian satu dengan bagian yang lainnya dan pada akhirnya tercipta suatu kegiatan-kegiatan yang terpadu mengarah pada satu tujuan umum.

Salah satu upaya pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong untuk mempermudah proses koordinasi dengan pihak PT Adaro Indonesia adalah dengan membentuk Tim Koordinasi dan Sinkronisasi (TKS) untuk mengakomodir perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan pemenuhan kewajibannya dalam mengkonsultasikan rencana program pengembangan dan pembangunan. Tim Koordinasi dan Sinkronisasi (TKS) merupakan tim perumus yang diketuai Sekda Tabalong bersama dengan Kepala Bappeda Tabalong selaku Sekretaris yang menjalankan fungsi manajemen Pemerintah Daerah baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program kerjasama dengan PT Adaro Indonesia dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Menurut White dalam Syafei (2011:33) bahwa koordinasi merupakan salah satu system fungsi dari manajemen yang memegang peranan-peranan yang sama pentingnya dan juga besetara dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Dan juga Koordinasi ialah salah satu bentuk dari Hubungan kerja yang memiliki karakteristik yang khusus. Pentingnya Koordinasi dikarenakan untuk menyatukan dan menyelaraskan unsur yang berbeda. Hal tersebut menunjukkan bahwa bentuk koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan PT. Adaro Indonesia adalah sebuah upaya penyesuaian dan sinkronisasi dari masing-masing pihak untuk mewujudkan program-program pembangunan sesuai dengan perencanaan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong melakukan pengaturan terhadap mekanisme perencanaan program pengembangan dan pembangunan secara berkelanjutan, mengingat dana yang dialokasikan oleh perusahaan cukup besar yakni pada tahun 2021 dana yang disiapkan sebesar 13 milyar meskipun dana tersebut belum sepenuhnya dapat terealisasi karena terkendala dengan adanya pandemi covid-19.

Setiap tahunnya departemen CSR PT Adaro Indonesia melakukan proses konsultasi rencana program CSR tahunannya kepada pemerintah Kabupaten Tabalong melalui Tim Koordinasi dan

Sinkronisasi yang sudah dibentuk oleh pemerintah daerah untuk membahas dan menelaah rencana program yang sudah di susun oleh PT Adaro Indonesia. Pertemuan-pertemuan rutin pembahasan kemajuan pelaksanaan program pengembangan dan program CSR antara perusahaan dan Tim Koordinasi dan Sinkronisasi (TKS) Program CSR Perusahaan yang Berada di Wilayah Kabupaten Tabalong terus berjalan secara berkelanjutan.

Pembentukan Tim Koordinasi dan Sinkronisasi (TKS) program CSR perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Tabalong merupakan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong, atau dalam teori kebijakan disebut "what government does". Pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan, memiliki tingkat kesulitan tersendiri. Sebagai industri ekstraktif yang mengolah hasil kekayaan alam serta menimbulkan perubahan bentang alam, wilayah cakupan pemberdayaan yang luas, dan lokasi usaha yang biasanya berada di remote area, pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di industri pertambangan memiliki tantangan yang lebih tinggi dibandingkan industri lainnya.

Sebagaimana konsep teori yang diprakarsai oleh John Elkington (1997) yang dikenal dengan istilah "3P", selain berorientasi pada profit, perusahaan yang ingin usahanya berkelanjutan haruslah juga memperhatikan aspek lingkungan dan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari aktivitas yang dilakukannya harus diimbangi dengan penanganan dampak yang komprehensif agar tidak merugikan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui pembentukan Tim Koordinasi dan Sinkronisasi (TKS) ini bermaksud agar program-program pemberdayaan masyarakat yang telah menjadi kewajiban perusahaan dilakukan secara terkoordinir dan sinergis dengan rencana pembangunan pemerintah daerah. Dengan demikian, persebaran pembangunan yang terjadi di wilayah yang bersangkutan merata dan tidak tumpang tindih dan mampu mengimbangi dampak aktivitas pertambangan yang terjadi.

Hal tersebut sejalan dengan definisi di dalam ISO 26000 dimana program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diarahkan sebagai upaya organisasi untuk bertanggung jawab terhadap dampak dari keputusan dan kegiatannya terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan

demikian niatan PT Adaro Indonesia dan pemerintah Kabupaten Tabalong untuk menjalankan program pembangunan sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi dampak dari aktivitasnya sudah sejalan dengan kriteria yang diharapkan di dalam standar pelaksanaan CSR yang menjadi acuan dunia.

Pelaksanaan program pembangunan yang tidak terkoordinasikan biasanya memiliki implikasi terhadap pencapaian arah pembangunan yang tidak seimbang. Biasanya perusahaan melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, semata-mata untuk mengamankan operasi dan pembangunan image perusahaannya di mata masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bayu Bajra (2015) menyatakan bahwa program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat menjadi komponen penting dalam pembangunan citra perusahaan di mata publik. Namun demikian, jika program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat hanya diorientasikan untuk pembangunan citra perusahaan, hal tersebut kemudian akan berimplikasi pada tumpang tindihnya program yang dilakukan di lapangan.

PT Adaro Indonesia memandang bahwa adanya Tim Koordinasi dan Sinkronisasi (TKS) program CSR ini telah membantu perusahaan untuk menemukan bentuk-bentuk kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang mampu mengakomodir kemajemukan dan kompleksitas masyarakat di Kabupaten Tabalong.

Beberapa desa pemberdayaan PT Adaro Indonesia memiliki penduduk pendatang yang cukup besar, yang juga merupakan dampak dari berkembangnya usaha-usaha ikutan di luar tambang yang menarik minat orang untuk datang. Namun di lain pihak ada desa yang mayoritas adalah penduduk asli. Oleh karena itu tumpang tindih program dan permasalahan lainnya dapat diminimalisir dari awal melalui proses konsultasi rencana program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan. Sehingga dengan demikian masyarakat dapat menerima dengan baik program-program yang dijalankan serta memberikan efek positif terhadap keberadaan perusahaan di mata masyarakat. Sebagaimana utarakan oleh Ploch (1976) bahwa pengembangan dan pemberdayaan masyarakat atau Community Development memiliki aspek utama yaitu keterlibatan aktif yang dilakukan

secara sukarela oleh masyarakat sebagai proses untuk meningkatkan aspek-aspek kehidupannya. Oleh karena itu, mengingat beragamnya kondisi demografi desa yang menjadi wilayah pemberdayaan PT Adaro Indonesia, penyusunan rancangan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PT Adaro Indonesia sebaiknya dilakukan dengan melibatkan penuh dari masyarakat dan pemerintah.

Implikasi dari tidak terkoordinasi dan tersinkronisasinya perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat oleh PT Adaro Indonesia dapat menimbulkan permasalahan yang mungkin bisa mengarah pada persoalan hukum. Apalagi hanya sekitar 40% saja desa- desa di seluruh Kabupaten Tabalong yang ditetapkan sebagai desa-desa wilayah pemberdayaan PT Adaro Indonesia, dapat menimbulkan kecemburuan. Hal ini bisa memunculkan konflik dan menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan dari program pembangunan yang dilakukan oleh PT Adaro Indonesia itu sendiri. Walaupun PT Adaro Indonesia telah membatasi pelaksanaan program pembangunan, namun bentuk usulan dari setiap desa yang beragam menjadikan pelaksanaan program menjadi sangat kompleks. Disanalah pentingnya pelibatan aktif dari masyarakat, sehingga dengan demikian, masyarakat akan puas dengan rencana program yang sudah disusun karena mereka terlibat langsung di dalamnya.

Oleh karena itu, maksud pemerintah Kabupaten Tabalong membentuk Tim Koordinasi dan Sinkronisasi (TKS) program CSR perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Tabalong, untuk mensinergiskan perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh perusahaan sudah benar. Tidak banyak daerah di Kalimantan Selatan yang membentuk sebuah badan khusus yang bersifat ad hoc untuk mensinergikan program-program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di wilayahnya. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Tabalong telah melakukan pembentukan tim khusus, dimana PT Adaro Indonesia adalah perusahaan yang menjadi client dari tim yang dibentuk tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian Penulis menemukan beberapa langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong

untuk mengkoordinasi program CSR yang terjadi di wilayahnya. Sebagai langkah pertama, Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong telah membentuk Tim Koordinasi dan Sinkronisasi yang di ketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong. Melalui tim koordinasi dan sinkronisasi tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong mengharapkan adanya penyesuaian antara program CSR yang dilakukan oleh pihak perusahaan dengan rencana pembangunan daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong dalam hal ini diwakili oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menyampaikan sejumlah Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) milik Kabupaten Tabalong. Kepala BAPPEDA juga menyampaikan beberapa contoh yang sudah dan yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong untuk dilakukan oleh pihak perusahaan melalui program CSR mereka. Proses sinkronisasi dilakukan melalui forum pertemuan. Kepala BAPPEDA Kabupaten Tabalong menyampaikan paparan tentang RKPD dan kemungkinan-kemungkinan kegiatan pembangunan yang dapat dilakukan oleh perusahaan.

Pemerintah dan perusahaan perlu juga menentukan mengenai indikator dan jadwal kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan CSR yang telah disepakati. Setelah kedua belah pihak mencapai suatu kesepakatan barulah dapat dikatakan telah terjadi sinkronisasi. Dari sisi lama pelaksanaan kegiatan sinkronisasi, penulis beranggapan bahwa sulit untuk mencapai kesesuaian antara rencana kerja milik pemerintah dan rencana CSR milik perusahaan sebagaimana yang diharapkan apabila hanya dilakukan dalam satu hari. Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong mengharapkan bahwa dengan adanya proses sinkronisasi akan dapat memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai kegiatan CSR yang ada. Termasuk hal-hal di dalamnya yang diinginkan oleh Pemerintah Daerah untuk kiranya bisa dikerjakan oleh perusahaan melalui kegiatan CSR.

2. Komunikasi

Keberhasilan pembangunan berawal dari adanya komunikasi yang efektif. Beberapa peran penting komunikasi dalam pembangunan antara

lain adalah sebagai transfer pengetahuan, meningkatkan aspirasi yang merupakan motivasi untuk bertindak nyata dan berpartisipasi dalam pembuatan setiap keputusan dalam kehidupan masyarakat.

Komunikasi pemerintahan diwujudkan dalam bentuk penyampaian ide, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat, perusahaan/kelompok maupun perseorangan. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui TIM Koordinasi dan Sinkronisasi berkedudukan sebagai komunikator (pemberi informasi) kepada pihak perusahaan PT Adaro Indonesia sebagai komunikan (penerima informasi), atau bisa juga sebaliknya.

Komunikasi antara pemerintah Daerah dengan PT Adaro merupakan salah satu bentuk komunikasi lintas sektoral yakni penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan sifat dan hubungan yang disampaikan dan yang diterima bukan saja berupa informasi, melainkan juga penyebaran ide-ide (*sharing ideas*), yang berhubungan dengan tindakan dan kebijakan pemerintah. Sehingga melalui TIM koordinasi dan sinkronisasi pemerintah Kabupaten Tabalong telah melakukan komunikasi yang baik dengan PT. Adaro Indonesia melalui tim CSR yang telah dibentuk. Komunikasi tersebut dilakukan melalui forum pertemuan bersama guna membahas beberapa program program CSR di Kabupaten Tabalong baik program pembangunan bidang ekonomi, sosial dan lingkungan.

Komunikasi yang efektif akan menimbulkan keterbukaan, saling percaya dan mempercepat aliran informasi sehingga masing-masing pihak dapat mengetahui perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang benar sehingga hasilnya memuaskan semua pihak. Keterbukaan dapat menghilangkan praktek monopoli, mengurangi kolusi, korupsi dan nepotisme yang selama ini sangat merugikan masyarakat. Adanya keterbukaan akan menimbulkan partisipasi aktif aparat pemerintah, swasta dan masyarakat sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan koordinasi pengawasan pembangunan. Dengan demikian tujuan pembangunan dapat tepat sasaran, tidak salah arah dan tercapai lebih cepat serta lebih baik. Menurut Jannah, Darmi, and Rochmayanti 2018 bahwa Komunikasi efektif merupakan proses penyampaian informasi kepada seseorang melalui cara tertentu agar si penerima informasi tersebut

mengerti dan tersampaikan dengan jelas.

Faktor-faktor yang mempengaruhi sinergitas Pemerintah Daerah dan PT Adaro Indonesia dalam pelaksanaan program CSR di Kabupaten Tabalong

3. Karakteristik Wilayah

Fokus utama yang menjadi prioritas dalam pembangunan adalah usaha untuk mencapai perbaikan ekonomi, yang tidak hanya terbatas pada golongan elite, tetapi juga secara menyeluruh dan merata sampai pada lapisan terbawah. Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut. Namun seringkali program pembangunan tersebut dianggap tidak sesuai dengan karakteristik wilayah tersebut.

Beragamnya kondisi desa-desa yang menjadi wilayah pemberdayaan PT Adaro Indonesia, seringkali memunculkan banyaknya variasi usulan kegiatan dari masyarakat. Variasi usulan kegiatan tersebut membuat perumusan rencana kegiatan yang dilakukan oleh PT Adaro Indonesia menjadi rumit. Proses verifikasi dan penilaian kelayakan usulan program membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih banyak. Dengan hanya ditetapkannya 34 desa dari 122 desa dan 9 kelurahan yang ada di Kabupaten Tabalong, seringkali usulan program yang disampaikan oleh masyarakat di luar desa yang menjadi wilayah pemberdayaan tidak dapat diakomodir oleh PT Adaro Indonesia.

Adanya kondisi tiap-tiap daerah yang berbeda menyebabkan strategi kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah juga berbeda-beda. Perbedaan tersebut diakibatkan antara lain adanya perbedaan potensi sumberdaya dan aktivitas manusia serta pertumbuhan penduduk yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Agar pembangunan dapat berjalan dengan seimbang dan lancar maka pemerintah harus memperhatikan semua daerah tanpa ada perlakuan khusus bagi masing-masing daerah.

4. Karakteristik Masyarakat

Karakteristik masyarakat dalam suatu wilayah memiliki beragam pandangan dan pengetahuan tentang program pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun swasta. Tidak semua masyarakat yang menerima alokasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dari PT Adaro Indonesia mampu melaksanakan program pembangunan baik dalam bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dan senantiasa menjadi pembahasan dalam proses konsultasi program pengembangan antara PT Adaro Indonesia dan pemerintah daerah.

Menurut Horton dan Hunt (1982:47) sebagai berikut: *"a society is a relatively independent, self-perpetuating human group who occupy territory, share a cultural, and have most of their associations within this group"* "masyarakat adalah kelompok manusia yang relatif mandiri, mengabdikan diri yang menempati wilayah, berbagi budaya, dan memiliki sebagian besar asosiasi mereka dalam kelompok." Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam setiap kelompok masyarakat yang menempati suatu wilayah memiliki karakter dan pandangan masing-masing sehingga tidak semua kelompok masyarakat mendukung dan menerima setiap keputusan dan kebijakan pemerintah. Hal tersebut tentunya sangat mempengaruhi proses pelaksanaan pembangunan sehingga diperlukan upaya serius dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa/Kelurahan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya program pembangunan.

5. Partisipasi Masyarakat

Menurut Bornby (dalam Aprilia Thesia, 2014) mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk mengambil bagian yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam proses pelaksanaan program CSR di Kabupaten Tabalong seharusnya melibatkan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan. Tidak adanya pelibatan komponen masyarakat di dalam proses konsultasi yang dilakukan oleh PT Adaro Indonesia kepada pemerintah daerah terkait rencana program pengembangan seringkali

menjadi salah satu hambatan pelaksanaan program dilapangan.

Dalam konteks ini, masyarakat memiliki hak untuk memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka. Dengan demikian, rakyat harus menjadi pelaku dalam pembangunan, masyarakat perlu dibina dan dipersiapkan untuk dapat merumuskan sendiri permasalahan yang dihadapi, merencanakan langkah-langkah yang diperlukan, melaksanakan rencana yang telah diprogramkan, menikmati produk yang dihasilkan serta melestarikan program yang telah dirumuskan dan dilaksanakan.

Program CSR dapat berjalan dengan baik apabila pemerintah bersama dengan masyarakat saling mendukung. Kepedulian pemerintah menjadi unit penting dalam pembangunan sebagai alat memfasilitasi segala kegiatan atau program utamanya pemerintah Desa/Kelurahan untuk mendorong dan melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan, hal ini dapat menjadi faktor pendorong dalam mempercepat perkembangan pembangunan.

Dasar tidak dilibatkannya masyarakat dalam proses koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong bersama dengan PT Adaro Indonesia karena pihak PT Adaro Indonesia telah melakukan pendataan lapangan untuk menjaring dan menampung aspirasi masyarakat yang akan dijadikan sebagai daftar usulan program sedangkan bagi pemerintah daerah mengacu pada hasil musyawarah pembangunan dari hasil-hasil tersebut dijadikan sebagai bahan untuk disinkronisasikan untuk ditetapkan sebagai program pemabngunan yang akan dilaksanakan.

KESIMPULAN

Sinergitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong dan PT Adaro Indonesia dalam pelaksanaan program CSR dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi dan komunikasi. Pelaksanaan koordinasi pemerintah daerah dan PT Adaro Indonesia dalam pelaksanaan program CSR meliputi program pembangunan dalam bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Proses koordinasi dilakukan melalui pertemuan untuk melakukan pembahasan program berdasarkan hasil pendataan dan daftar usulan yang ada. Adapun hasil-hasil koordinasi tersebut telah menetapkan beberapa program diantaranya adalah pembinaan UMKM

mereka dilatih bikin packaging, branding, permodalan dan akses internet. Selanjutnya adalah bina desa seperti pembinaan pembinaaan Bumdes, pembinaan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, infrastruktur dan ekonomi. Sedangkan untuk program pembangunan bidang lingkungan adalah sekolah adiwiyata, bank sampah dan kampung iklim. Sedangkan untuk kegiatan komunikasi dilakukan melalui forum pertemuan bersama guna membahas beberapa program program CSR di Kabupaten Tabalong baik program pembangunan bidang ekonomi, sosial dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Rudito , B., & Famiola, M. (2013). *CSR (Corporate Sosial Responsibility)*. Bandung: Penerbit Rekayasa Sains.
- Arifin , B., & Rachbini, D. J. (2011). *Ekonomi Politik Dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Grasindo.
- Azheri, B. (2012). *Corporate Social Responsibility : Dari Voluntary Menjadi Mandatory,.* Jakarta: Rajawali Pers.
- Budimanta, A. P., & Rudito, B. (2005, Februari 20). *Corporate Social Responsibility Alternatif Bagi Pembangunan Indonesia*. ICSD. Retrieved Februari 20, 2021
- Finalia. (2014). *Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan dan Keterlibatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengaturan dan Pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility)*. Bandung: UKM.
- Firmansyah , M. I. (2016). Studi Deskriptif Tentang Sinergitas Kewenangan Antara Bpjs Kesehatan dengan Organisasi Profesi dalam Penyediaan Layanan Kesehatan di Kota Surabaya. *Jurnal Universitas Airlangga*, 4(2), 146 – 156. Retrieved from <http://journal.unair.ac.id/KMP@studi-deskriptif-tentang-sinergitas-kewenangan-antara-bpjs-article-10910-media-138-category-8.html>.
- Hudiyanto. (2004). *Ekonomi Politik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kartasasmita. (2004). *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*. Jakarta: Cidesindo.

- Mulya, F. C. (2008). *Dimensi Manusia Dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Mulyana. (2018, 12 5). *Sinergitas Dan Kemitraan Perencanaan Program*. Retrieved Februari 20, 2021, from wsmulyana.wordpress: <https://wsmulyana.wordpress.com/2008/12/05/sinergitas-dan-kemitraan-perencanaan-program>
- Mutmainnah, S. H., & Kusumaningtyas, E. (2011, April). Model Peningkatan Return Saham dan Kinerja Keuangan Melalui Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*.
- Ordóñez, C., & Duinker, P. (2010). Interpreting Sustainability for Urban Forests. *Jurnal Canada*, 2, 124-127. Retrieved Februari 20, 2021
- Pangerang, M., & Anugrah, P. (2017). *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Makassar: PT Raja Grafindo Persada.
- Portes, R., & Rey. (2006). The Determinants of Cross-Border Equity Flows. *Journal of international Economics*.
- Rahayu, A. S. (2017). *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Malang: Sinar Grafika.
- Riyadi. (2005). *Pembangunan Dasar-Dasar Dan Pengertiannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Salim, E. (2003). *Makalah untuk Pertemuan Hukum*. Bali: BPHN.
- Sarundajang, S. H. (2009). *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Siagian, P. S. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Silalahi, U. (2011). *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama.
- Soejito, I. (2019). *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soemarwoto, O. (2004). *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Sofyandi, & Garniwa. (2007). *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu Sudarmadji, 2008. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, Lingkungan Hidup dan Otonomi Daerah*.
- Sukarja, D., & Nasution, B. (2018). A Decade of Regulation Corporate Social Responsibility in Indonesia”, (Makalah yang disampaikan dalam di, tanggal 10-11 Mei). *Asian Law Institute Conference ke 16*. Seoul: Seoul National University.
- Sukirno. (2011). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Susiana, S. (2015). *Pembangunan Berkelanjutan: Dimensi Sosial, Ekonomi, Dan Lingkungan*. Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika.
- Tjandra, W. R., & Harsono, K. B. (2009). *Legislatif Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Tikson, T Deddy, dkk. 2004. *Evaluasi Pembangunan Pasca Otonomi Daerah di Sulawesi Selatan*, Kerjasama Bappeda Propinsi Sulsel dengan Lembaga Penelitian Unhas, Makassar.